

## DISPARITAS & TRANSFORMASI STRUKTURAL ANTAR KABUPATEN/KOTA DI KALIMANTAN

### *DISPARITY AND STRUCTURAL TRANSFORMATION ACROSS DISTRICTS IN KALIMANTAN*

**Maria Christina Yuli Pratiwi**

Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur  
Jl. Jenderal Sudirman Km. 5,5, Sampit  
E-mail: mcy.pratiwi@yahoo.co.id

Dikirim 09 Oktober 2018 Direvisi 07 November 2018 Disetujui 15 November 2018

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketidakmerataan pembangunan antarwilayah di Pulau Kalimantan dan mengetahui apakah Hipotesis Kutnez berlaku di Pulau Kalimantan. Tipologi Klassen, Indeks Williamson dan Indeks Entropi Theil, Transformasi Struktural, serta Gini Rasio digunakan untuk menganalisis ketimpangan di 56 kabupaten/kota selama periode 2010-2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) mayoritas wilayah di Pulau Kalimantan tergolong dalam daerah berkembang cepat; (2) Hipotesis Kutnez berlaku di Pulau Kalimantan; (3) ketimpangan pembangunan di Pulau Kalimantan selama periode penelitian cenderung menurun; (4) Provinsi Kalimantan Timur memberi sumbangan terbesar terhadap ketimpangan di Pulau Kalimantan; dan (5) transformasi struktural tertinggi terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara.

**Kata kunci:** Pertumbuhan, Ketimpangan, Indeks Williamson, Indeks Entropi Theil, Hipotesis Kutnez.

**Abstract:** *The purpose of this paper to determine the uneven development across districts in Kalimantan and also to examines whether Kutnez hypothesis is applicable in Kalimantan. Klassen Typology, Williamson Index dan Entropy Theil Index, Structural Transformation, also Ratio Gini are employed in order to analysis the inequality of 56 districts in Kalimantan during 2010-2016. The result of study shows that: (1) the majority of regions on the island of Kalimantan belong to developed regions; (2) Kutnez hypothesis is applicable in Kalimantan; (3) regional inequality in Kalimantan shows an decline trend for the period of observation; (4) East Kalimantan province gives the largest contribution towards the inequality in Kalimantan; and (5) the highest structural transformation have been in Kutai Kartanegara District.*

**Keywords :** *Growth, Inequality, Williamson Index, Theil Entropy Index, Kutnez Hypothesis.*

## PENDAHULUAN

Pembangunan adalah perubahan ke arah kondisi yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana dan merupakan komitmen sebuah bangsa untuk mengejar ketertinggalan dalam berbagai sektor. Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan yang merata. Tolok ukur keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat dilihat dari pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kesenjangan pendapatan antarpenduduk dan antarsektor yang semakin kecil. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan jika tingkat kegiatan perekonomiannya

meningkat atau lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunan dapat terlihat dari pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kesenjangan pendapatan rendah. Masih besarnya kesenjangan antarwilayah tercermin dari perbedaan pertumbuhan ekonomi dan kontribusi PDRB terhadap PDB nasional. Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi seringkali tidak diimbangi pemerataan sehingga menimbulkan berbagai dilema dalam pembangunan nasional dan memperlebar kesenjangan antarwilayah, serta menimbulkan permasalahan ekonomi yang berlapis-lapis, seperti kemiskinan,

kesenjangan sosial-ekonomi, ketimpangan antarwilayah (kota-desa, pusat-daerah). Sebagai suatu permasalahan dalam pembangunan, ketimpangan tidak dapat dihilangkan secara sempurna. Ketimpangan pembangunan antarwilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi, baik pada golongan keluarga atau masyarakat, maupun antardaerah dalam suatu wilayah tertentu. Adanya perbedaan distribusi pendapatan antardaerah dan distribusi pengeluaran pemerintah pusat dan daerah merupakan salah satu permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan. Perbedaan tersebut terjadi selama bertahun-tahun sehingga menyebabkan terjadinya ketimpangan antardaerah

Menurut Sjafrizal (2008 dalam Sitorus, 2012: 34), ketimpangan antarwilayah disebabkan oleh perbedaan kandungan sumber daya alam dan kondisi demografi masing-masing wilayah, sehingga kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan menjadi berbeda pula. Perbedaan kekayaan daerah menimbulkan adanya wilayah maju (developed region) dan wilayah

terbelakang (underdeveloped region). Fenomena terjadinya ketimpangan dalam pembagian pendapatan sudah menjadi fenomena umum yang terjadi baik pada negara-negara maju maupun negara berkembang, salah satunya adalah Indonesia. Ketimpangan regional di Indonesia terjadi karena pemerintah pusat menguasai dan mengendalikan hampir sebagian besar pendapatan daerah yang ditetapkan sebagai penerimaan negara. Pembangunan masih terpusat di Kawasan Indonesia Barat khususnya di Pulau Jawa. Tabel 1 menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Kawasan Barat Indonesia (KBI) lebih tinggi dibandingkan dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Pertumbuhan ekonomi Kawasan Barat Indonesia dari Tahun 2010-2016 mencapai rata-rata 5,78 persen dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh Pulau Bali, sebesar 6,55 persen. Dari sisi kontribusi PDRB terhadap PDB nasional, kontribusi PDRB Kawasan Barat Indonesia sangat dominan dan tidak pernah berkurang dari 80 persen (lihat Tabel 2).

**Tabel 1.** Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Di Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia, 2011-2016 (dalam persen)

Provinsi	Tahun						Rata-rata
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Kawasan Barat Indonesia							5,78
Sumatera	6,19	5,75	4,95	4,60	3,53	4,29	4,89
Jawa	6,37	6,37	6,01	5,57	5,47	5,59	5,90
Bali	6,66	6,96	6,69	6,73	6,03	6,24	6,55
Kawasan Timur Indonesia							5,46
Kalimantan	6,45	5,72	3,95	3,37	1,37	2,01	3,81
Sulawesi	8,54	9,04	7,69	6,87	8,19	7,42	7,96
Nusa Tenggara	-0,22	1,31	5,27	5,12	14,67	5,57	5,29
Maluku dan Papua	-0,57	3,20	7,71	4,54	6,35	7,45	4,78
Jumlah 33 Provinsi	6,17	6,03	5,56	5,01	4,88	5,03	5,45

Sumber: BPS, 2010-2016 (diolah)

**Tabel 2.** Peran Wilayah/Pulau dalam Pembentukan PDB Nasional, 2010-2016  
(dalam persen)

Pulau	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Sumatera	22,3 9	22,8 7	23,1 0	23,0 5	23,0 2	22,1 8	22,0 3
Jawa	57,2 8	56,7 0	56,6 9	57,0 6	57,3 9	58,3 4	58,4 9
Kalimantan	9,41	9,92	9,66	9,25	8,77	8,15	7,85
Sulawesi	5,19	5,24	5,41	5,50	5,64	5,91	6,04
Maluku dan Papua	2,70	2,44	2,35	2,34	2,31	2,36	2,46
Nusa Tenggara	1,66	1,50	1,43	1,40	1,41	1,54	1,58
Bali	1,37	1,34	1,36	1,40	1,46	1,52	1,54

Sumber: BPS, 2010-2016 (diolah)

Ketimpangan antardaerah penting untuk diteliti karena gravitasi aktivitas ekonomi Indonesia masih cenderung terkonsentrasi secara geografis ke Kawasan Barat Indonesia (KBI) selama lebih dari lima dasawarsa terakhir. Struktur perekonomian Indonesia secara spasial masih terkonsentrasi di KBI sekitar 80-82 persen (Tabel 2). Data BPS Tahun 2017 menunjukkan bahwa struktur perekonomian Indonesia secara spasial masih didominasi kelompok provinsi di Pulau Jawa. Wilayah-wilayah di Pulau Jawa memberi kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 58,49 persen, disusul Sumatra (21,66 persen), Kalimantan (8,20 persen), Sulawesi (6,11 persen), Maluku dan Papua (2,43 persen, serta Bali dan Nusa Tenggara (masing-masing 1,56 persen). Kawasan Timur Indonesia (KTI), sebagai kawasan pinggiran, hanya mendapat sisanya, yaitu sekitar 17-20 persen. Walaupun kontribusi Pulau Sumatera cenderung menurun, namun pola unbalanced development di Indonesia masih terus terjadi, yang tercermin dari kuatnya “pusat” (Jawa-Sumatra) sebagai gravitasi pembangunan dan menyisakan “pinggiran” (KTI dan desa). Sumberdaya alam Kalimantan memiliki potensi untuk dikembangkan, seperti migas, batubara, emas, hasil-hasil hutan yang melimpah, namun perekonomian wilayah Kalimantan hanya

mampu menyumbang 7,85 persen terhadap perekonomian Indonesia (menempati urutan ketiga) dan cenderung menurun. Menurut Kuncoro (2010: 173), hasil pembangunan di Pulau Kalimantan belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, sebagaimana tercermin dari masih banyaknya keluarga miskin, pengangguran, dan meningkatnya ketimpangan antardaerah. Hal ini diperkuat dengan semakin menurunnya laju pertumbuhan ekonomi dan kontribusi PDRB Pulau Kalimantan terhadap PDB nasional (Tabel 2).

Dalam penelitiannya, Kuncoro, (2013: 246) menjelaskan bahwa berdasarkan hasil klasifikasi daerah seluruh provinsi di Indonesia Tahun 2001-2008, Provinsi Kalimantan Timur merupakan satu-satunya provinsi di Kalimantan yang termasuk dalam klasifikasi daerah cepat maju dan tumbuh, penyumbang terbesar terhadap PDRB Kalimantan dan perekonomian nasional. Tabel 3 menunjukkan perbedaan mencolok antarprovinsi berdasarkan nilai PDRB per kapita. Di Kalimantan, hanya Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang memiliki PDRB per kapita melampaui rata-rata PDRB per kapita Indonesia. Provinsi yang memiliki PDRB per kapita di atas Indonesia umumnya berbasis sumber daya alam melimpah atau mempunyai jumlah penduduk yang banyak.

**Tabel 3.** Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita 2012-2016 Atas Harga Konstan (Ribu Rupiah)

Provinsi	PDRB Per Kapita				
	2012	2013	2014	2015	2016
Aceh	23.099,13	23.228,59	23.129,04	22.524,31	22.837,27
Sumatra Utara	28.036,88	29.339,21	30.477,07	31.637,41	32.885,09
Sumatra Barat	23.744,01	24.857,64	25.982,83	27.080,76	28.164,93
Riau	72.396,34	72.297,05	72.390,88	70.769,78	70.604,43
Jambi	32.417,72	34.012,10	35.878,09	36.753,52	37.728,80
Sumatra Selatan	28.577,89	29.656,76	30.636,27	31.549,30	32.699,05
Bengkulu	18.143,51	18.919,30	19.626,72	20.302,48	21.041,59
Lampung	21.794,83	22.770,68	23.647,27	24.581,78	25.571,04
Kep. Bangka Belitung	31.172,42	32.081,30	32.859,64	33.480,38	34.134,61
Kep. Riau	70.930	73.743,33	76.313,81	78.625,43	80.330,54
DKI Jakarta	123.962,38	130.060,31	136.312,34	142.913,61	149.847,63
Jawa Barat	23.036,00	24.118,31	24.966,86	25.845,50	26.921,57
Jawa Tengah	20.950,62	21.844,87	22.819,16	23.887,06	24.965,78
DI Yogyakarta	20.183,88	21.037,70	21.867,90	22.688,36	23.566,32
Jawa Timur	29.508,40	31.092,04	32.703,39	34.271,81	35.970,71
Banten	27.716,47	28.910,66	29.846,64	30.813,03	31.780,68
Bali	26.689,58	28.129,67	29.668,90	31.093,61	32.686,68
Nusa Tenggara Barat	14.276,69	14.809,84	15.369,94	18.475,14	19.308,54
Nusa Tenggara Timur	10.030,98	10.396,76	10.742,32	11.087,91	11.474,04
Kalimantan Barat	21.062,22	21.971,93	22.712,65	23.456,52	24.310,94
Kalimantan Tengah	27.749,01	29.106,40	30.216,73	31.619,18	32.903,20
Kalimantan Selatan	25.547,77	26.423,39	27.220,27	27.786,68	28.538,56
Kalimantan Timur	124.501,88	133.868,68	133.086,11	128.603,13	125.409,43
Kalimantan Utara	-	74.106,93	77.152,60	76.823,46	76.785,54
Sulawesi Utara	25.145,96	26.445,86	27.805,52	29.196,47	30.682,60
Sulawesi Tengah	22.724,47	24.490,98	25.316,27	28.778,64	31.164,25
Sulawesi Selatan	24.507,17	26.083,42	27.749,47	29.435,92	31.305,06
Sulawesi Tenggara	25.489,79	26.815,36	27.896,05	29.202,70	30.477,19
Gorontalo	16.650,27	17.639,12	18.622,44	19.474,13	20.427,82
Sulawesi Barat	17.169,06	18.008,81	19.232,05	20.250,51	21.067,91
Maluku	13.129,11	13.572,07	14.219,62	14.740,38	15.321,09
Maluku Utara	15.691,01	16.332,22	16.869,52	17.533,78	18.177,30
Papua Barat	55.047,84	57.581,36	59.142,59	60.064,13	61.242,01
Papua	36.280,03	38.621,36	39.271,88	41.376,97	44.340,94
Indonesia	31.484,50	32.781,00	33.965,40	35.161,90	36.462,50

SUMBER: BPS (2017).

Kinerja ekonomi Pulau Kalimantan secara umum membaik dan kegiatan perekonomiannya semakin meningkat. Hal ini terlihat dari nilai PDRB ADHK migas

dan non migas seluruh provinsi di Pulau Kalimantan (kecuali Provinsi Kalimantan Timur) yang cenderung meningkat setiap tahun dan pertumbuhannya positif.

Walaupun perekonomian wilayah Kalimantan cukup baik, namun hasil pembangunan di Pulau Kalimantan belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Ketimpangan cukup tinggi terjadi di beberapa kabupaten/kota. Perbedaan beberapa indikator sosial ekonomi antarkabupaten/kota, seperti nilai pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang cukup mencolok, menunjukkan bahwa pembangunan dan distribusi pendapatan di Kalimantan belum terlaksana merata.

Pembangunan merupakan suatu proses transformasi yang ditandai dengan perubahan struktural, yakni perubahan yang terjadi pada landasan kegiatan ekonomi dan pada kerangka susunan ekonomi masyarakat. Di Pulau Kalimantan diduga terjadi transformasi struktur ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari perubahan sumbangan sektor

pertambangan dan penggalian ke sektor pengadaan listrik dan gas terhadap PDRB Pulau Kalimantan. Tabel 5 menunjukkan bahwa selama kurun waktu 2012-2016, sektor pertambangan dan penggalian cenderung turun, sedangkan sektor pengadaan listrik dan gas cenderung naik. Sumbangan sektor pertambangan dan penggalian yang semula sebesar 42,87 persen pada Tahun 2012 turun sekitar 33 persen menjadi 28,93 persen pada Tahun 2016. Sedangkan sektor pengadaan listrik dan gas yang semula menyumbang 0,03 persen naik 94 persen menjadi 0,07 persen. Hal ini bukan berarti bahwa produksi sektor pertambangan dan penggalian mengalami penurunan, akan tetapi yang terjadi adalah pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian kalah cepat dibandingkan dengan sektor pengadaan listrik dan gas.

**Tabel 4.** Gambaran Umum Indikator Sosial Ekonomi Kabupaten/Kota, 2016

Indikator Sosial Ekonomi	Minimum	Maksimum	Mean	Nasional
Indikator Ekonomi				
PDRB Perkapita non migas (juta rupiah)	16.965.92 0,63	283.862.69 9,59	59.614.45 0,54	47.957.40 0,00
Pertumbuhan Ekonomi (%)	-4,79	7,97	4,25	5,03
Pengeluaran Per Kapita (rupiah)	527.750	1.559.407	908.925,8 0	946.258
Kemiskinan (%)	2,81	12,63	6,46	10,70
Indikator Ketenagakerjaan				
Tingkat Pengangguran (%)	0,64	12,44	4,54	5,61
Indikator Pendidikan				
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	5,84	11,02	7,95	8,42
Harapan Lama Sekolah (tahun)	11,05	14,91	12,39	12,72
Indeks Pembangunan Manusia	60,87	79,21	68,70	70,18
Indikator Kependudukan				
Angka Harapan Hidup (tahun)	62,71	73,96	70,05	70,90
Dependency Ratio	38,86	52,89	48,97	48,93
Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )	1,34	9.414.9	410,14	133.5

Sumber: BPS, 2016 (diolah)

**Tabel 5.** Perbandingan Distribusi Persentase PDRB ADHK Pulau Kalimantan Berdasarkan Lapangan Usaha, 2012-2016 (dalam persen)

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	2016
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10,77	11,30	12,33	13,00	13,35
Pertambangan dan Penggalian	42,87	40,44	35,92	30,94	28,93
Industri Pengolahan	16,53	16,19	17,11	17,67	17,76
Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,03	0,04	0,06	0,07
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,10	0,09	0,10	0,11	0,12
Konstruksi	7,16	7,76	8,49	9,29	9,39
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,68	7,00	7,49	8,24	8,66
Transportasi dan Pergudangan	3,24	3,67	4,04	4,53	4,79
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,09	1,16	1,24	1,40	1,48
Informasi dan Komunikasi	1,57	1,63	1,73	1,88	1,99
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,93	2,11	2,20	2,35	2,44
Real Estate	1,30	1,34	1,44	1,57	1,60
Jasa Perusahaan	0,24	0,26	0,28	0,30	0,30
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,03	3,35	3,63	4,17	4,29
Jasa Pendidikan	2,05	2,22	2,40	2,70	2,89
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,80	0,83	0,91	1,05	1,13
Jasa Lainnya	0,60	0,60	0,66	0,75	0,82

Sumber: BPS, 2010–2016 (diolah)

## TINJAUAN LITERATUR

Ketimpangan pembangunan antarwilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi. Ketimpangan antarwilayah dapat memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat dan formulasi kebijakan pembangunan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Teori ketimpangan pembangunan antarwilayah dimunculkan pertama kali oleh Douglas C North dalam analisisnya tentang Teori Pertumbuhan Neo-Klasik. Dalam teori tersebut dimunculkan sebuah prediksi tentang hubungan antartingkat pembangunan ekonomi nasional suatu Negara dengan ketimpangan pembangunan antarwilayah. Hipotesa ini kemudian lazim dikenal sebagai *Hipotesa Neo-Klasik*.

Menurut teori Neo Klasik, pada awal proses pembangunan suatu negara,

ketimpangan pembangunan antarwilayah cenderung meningkat. Proses tersebut akan terjadi sampai ketimpangan mencapai titik puncak. Saat proses pembangunan terus berlanjut, ketimpangan pembangunan antarwilayah akan berangsur-angsur menurun. Kuznets (1971 dalam Todaro, 2006) menyatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, keterkaitan antara pertumbuhan dan ketimpangan seperti U-terbalik yang mana pada tahap awal pembangunan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung buruk dan tidak akan meningkat sampai negara tersebut mencapai status berpendapatan menengah (*middle-income*). Namun sesudah fase tersebut, distribusi pendapatan akan terus membaik atau ketimpangan akan terus menurun.

Teori Lewis, yaitu model dua sektor Lewis (Lewis two-sector model), menyatakan bahwa pada negara

berkembang terjadi transformasi struktur perekonomian dari pola perekonomian pertanian subsisten tradisional ke perekonomian yang lebih modern, lebih berorientasi pada kehidupan perkotaan, memiliki sektor industri manufaktur yang lebih bervariasi dan sektor jasa-jasa yang tangguh. Teori Lewis diakui sebagai teori umum yang membahas proses pembangunan di negara-negara dunia ketiga yang mengalami kelebihan penawaran tenaga kerja (Todaro & Smith, 2003: 116). Beberapa faktor penyebab terjadinya transformasi ekonomi, salah satunya adalah sifat manusia dalam

kegiatan konsumsinya. Sesuai dengan Hukum Engels, makin tinggi pendapatan masyarakat, makin sedikit proporsi pendapatan yang digunakan untuk membeli bahan pertanian, sebaliknya proporsi pendapatan untuk membeli barang-barang produksi industri menjadi bertambah besar. Dengan demikian peranan sektor industri akan semakin besar dibandingkan sektor pertanian.

Penelitian tentang ketimpangan dan tranformasi struktural telah banyak dilakukan. Sebagai pembanding, diuraikan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

**Tabel 6.** Tinjauan Literatur

No.	Peneliti/ Tahun	Alat Analisis	Hasil Analisis
Studi di Luar Negeri			
1	Easterly (2001)	Regresi dan Indeks Gini	Kemiskinan di Pakistan meningkat dari 22 persen menjadi 32 persen yang disebabkan oleh instabilitas politik dan ekonomi, tekanan inflasi yang tinggi dan tingkat tabungan yang rendah.
2	Bonet, <i>et al.</i> , (2006)	Metode Ekonometri	Desentralisasi fiskal di Kolumbia selama periode 1990-an menyebabkan ketimpangan semakin meningkat. Kebijakan desentralisasi fiskal berdampak pada ketimpangan pendapatan. Variabel kontrol seperti aglomerasi dan tingkat keterbukaan berdampak negatif terhadap ketimpangan.
3	Yang, <i>et.al.</i> , (2008)	Analisis Cluster	Ketimpangan pembangunan di Cina disebabkan oleh ketimpangan perekonomian regional.
4	Ogunleye (2011)	Polaritas Pertumbuhan dan Analisis <i>Cluster</i>	Afrika Selatan, Botswana, Nigeria, Angola, dan Kenya merupakan kutub-kutub pertumbuhan yang paling konsisten di Sub Sahara Afrika. Ghana, Kamerun, Ethiopia, Tanzania, dan Guinea adalah daerah- daerah pusat pertumbuhan potensial di <i>Sub-Saharan Africa (SSA)</i> .
5	Ayelazuno (2013)	Analisis PDB, PDB per kapita, dan IPM	Ghana gagal melakukan diversifikasi ekonomi ke dalam industrialisasi, khususnya manufaktur. Ketimpangan di Ghana semakin parah, jumlah pengangguran meningkat, utang tinggi, kesenjangan sosial semakin besar, infrastruktur terbelakang.
6	Cingano (2014)	Analisis Ekonometri dan Indeks Gini	Ketimpangan pendapatan di negara-negara OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap pertumbuhan. Ketimpangan yang semakin meningkat menekan pengembangan keterampilan individu terutama dari segi pendidikan, baik secara kuantitas maupun kualitas.
7	Ncube, <i>et al.</i> , (2014)	Metode Ekonometri (OLS)	Ketimpangan pendapatan berdampak pada pengurangan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kemiskinan di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara atau <i>Middle East and North Africa (MENA)</i> . Faktor-

No.	Peneliti/ Tahun	Alat Analisis	Hasil Analisis
Studi di Luar Negeri			
			faktor negatif yang signifikan memengaruhi adalah pertumbuhan ekonomi sebelumnya, nilai tukar mata uang, beban pemerintah, PDB per kapita, inflasi dan pendidikan dasar.
Studi di Dalam Negeri			
8	Chrisyanto (2006)	Analisis Regresi Linier Berganda	Ketimpangan ekonomi antardaerah di Indonesia disebabkan oleh tingginya pendapatan per kapita Provinsi DKI Jakarta.
9	Soetopo (2009)	Indeks Williamson (CVw)	Ketimpangan pendapatan antarpulau di Indonesia tergolong dalam taraf ketimpangan rendah dengan nilai indeks ketimpangan antara 0,210 sampai 0,261.
10	Rochana (2012)	Indeks Williamson	Kesenjangan ekonomi antarwilayah di Indonesia semakin besar pada era otonomi daerah.
11	Kuncoro (2013)	Indeks Theil Entropi	Ketimpangan antardaerah di Indonesia cenderung meningkat selama periode 2001-2010 baik antarpulau maupun di dalam pulau.
12	Santosa (2015)	Shift Share, Indeks Williamson, Tipologi Klassen, dan Uji Hipotesis U Terbalik	Terjadi perubahan struktur pada kabupaten dalam SWP IV Jawa Timur dan ketimpangan di wilayah SWP IV Jawa Timur mengalami penurunan.

## METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan di Pulau Kalimantan yang mencakup 5 provinsi, 9 kota dan 47 kabupaten dengan periode amatan Tahun 2010–2016. Variabel penelitian ini mencakup tiga indikator sosial ekonomi kabupaten/kota, terdiri dari PDRB, jumlah penduduk, dan PDRB per kapita. Data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dengan rentang waktu Tahun 2010-2016.

### A. *Metode Analisis Data*

#### Tipologi Klassen

Tipologi Klassen merupakan salah satu alat analisis ekonomi daerah untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan suatu daerah. Daerah dapat diklasifikasi berdasarkan 2 indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pendapatan (PDRB) per kapita dengan

menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi pada sumbu vertikal dan rata-rata PDRB per kapita pada sumbu horizontal. Menurut Kuncoro (2004: 131), ada empat klasifikasi daerah dalam tipologi kabupaten/kota yaitu: (1) daerah cepat maju dan tumbuh, yaitu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang tinggi; (2) daerah berkembang cepat, yaitu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi pendapatan per kapitanya rendah; (3) daerah maju tertekan, yaitu daerah yang memiliki pendapatan per kapita yang tinggi, tetapi tingkat pertumbuhan ekonominya rendah; dan (4) daerah daerah tertinggal, yaitu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang rendah.

**Tabel 7.** Klasifikasi Wilayah Berdasarkan PDRB Perkapita dan Pertumbuhan Ekonomi

Tingkat pertumbuhan dibandingkan dengan pertumbuhan provinsi	Tingkat pendapatan daerah dibandingkan dengan tingkat pendapatan provinsi	Tingkat pendapatan daerah dibandingkan dengan tingkat pendapatan provinsi	
		$Y_i > Y$	$Y_i < Y$
$R_i > r$		Tipe I Daerah cepat maju dan tumbuh	Tipe II Daerah berkembang cepat
$R_i < r$		Tipe III Daerah maju tapi tertekan	Tipe IV Daerah tertinggal

Sumber: Kuncoro, (2004: 131)

**B. Indeks Williamson dan Entropi Theil**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif deskriptif dengan alat analisis berupa Indeks Williamson dan Indeks Entropi Theil. Indeks Williamson dan Indeks Entropi Theil adalah salah satu metode untuk mengukur ketimpangan antardaerah. Indeks Williamson dikemukakan oleh Williamson (1965) yang mengemukakan model Vw (indeks tertimbang atau weighted index) dan Vuw (tidak tertimbang atau un-weighted index) untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan per kapita suatu negara pada waktu tertentu (Dhyatmika, 2013: 31). Formulasi dari Indeks Williamson (Williamson, 1965: 12) adalah sebagai berikut:

$$IW = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 \cdot f_i / n}}{\bar{y}}$$

di mana:

- IW = Indeks Williamson;
- $y_i$  = PDRB per kapita kabupaten/kota i;
- $\bar{y}$  = PDRB per kapita Kalimantan;
- $f_i$  = jumlah penduduk kabupaten/kota i;
- n = jumlah penduduk Kalimantan.

Indeks Williamson berkisar antara  $0 < IW < 1$ , apabila nilai koefisien semakin mendekati nol artinya wilayah tersebut semakin tidak timpang. Apabila mendekati satu maka wilayah tersebut semakin timpang (Sjafrizal, 2008 dalam Sitorus,

2012: 35). Ketimpangan distribusi pendapatan antarwilayah yang rendah menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi antardaerah merata, sedangkan jika ketimpangan distribusi pendapatan antarwilayah tinggi, maka pertumbuhan ekonomi antardaerah tidak merata.

Indeks Entropi Theil diperkenalkan oleh Henri Theil (1967). Indeks ini mempunyai kelebihan dibandingkan dengan indeks konsentrasi spasial yang lain, yaitu pada suatu titik waktu, indeks ini menyediakan ukuran derajat konsentrasi distribusi spasial pada sejumlah daerah dan subdaerah dalam suatu Negara. Rumus dari indeks Entropi Theil adalah sebagai berikut (Akita, 2003: 58).

$$IC = \sum_{i=1}^N \frac{GDP_i}{GDP_u} \log \frac{y_i}{\bar{y}} = IC_{BR} + IC_{WR}$$

di mana:

- IC = Indeks Entropi Theil;
- $GDP_i$  = PDRB kabupaten/kota i;
- $GDP_u$  = PDRB Pulau Kalimantan;
- $y_i$  = PDRB per kapita kabupaten/kota;
- $\bar{y}$  = PDRB per kapita Kalimantan;
- $IC_{BR}$  = Indeks Entropi Theil Between Group;
- $IC_{WR}$  = Indeks Entropi Theil Within Group.

### C. *Transformasi Struktural*

Untuk mengukur seberapa cepat suatu daerah mengalami transformasi perekonomian, dapat menggunakan Indeks Transformasi Struktural (Hill, *et.al*, 2009 dalam Kuncoro, 2010: 179).

Rumus Indeks Transformasi Struktural (ITS) (Kuncoro, 2010: 179) adalah:

$$ITS = \sum | share_{i,tahun\ terakhir} - share_{i,tahun\ awal} |$$

di mana:  
i = 9 sektor ekonomi

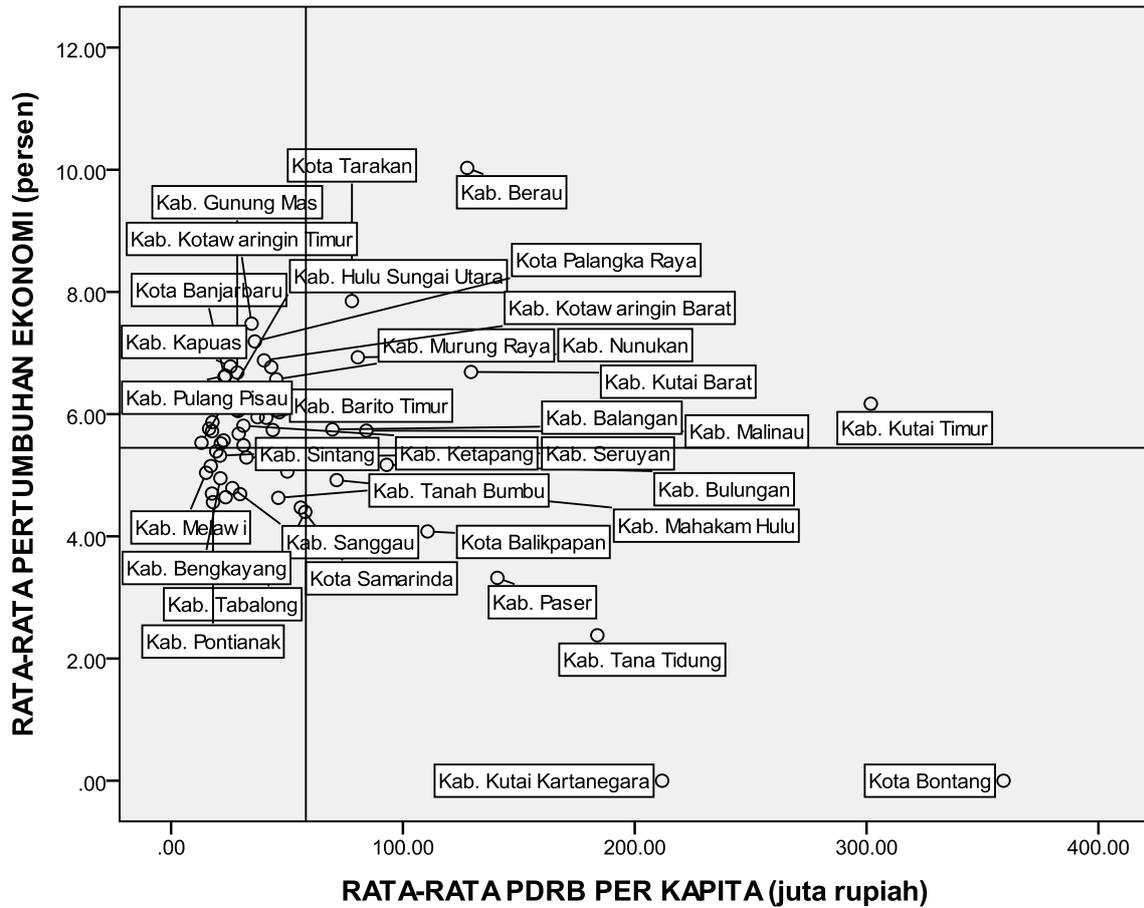
## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. *Tipologi Klassen*

Salah satu indikator ekonomi untuk menggambarkan perekonomian suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita. Tipologi Klassen merupakan salah satu alat analisis ekonomi regional yang digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Daerah dibagi menjadi empat klasifikasi, yaitu: daerahcepat maju dan tumbuh, daerah maju tertekan, daerah berkembang cepat, dan daerah tertinggal.

Berdasarkan hasil analisis Tipologi Klassen di Pulau Kalimantan (Gambar 1) diperoleh bahwa terdapat 6 kabupaten dan 1 kota merupakan daerah maju dan tumbuh, 22 kabupaten dan 5 kota merupakan daerah berkembang cepat, 5 kabupaten dan 2 kota termasuk dalam daerah maju tertekan, dan 14 kabupaten dan 1 kota tergolong dalam daerah tertinggal.

Mayoritas kabupaten/kota yang dikategorikan sebagai daerah maju dan tumbuh terdapat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, meliputi Kabupaten Kutai Barat, Kutai Timur, Berau, Malinau, Nunukan, dan Kota Tarakan. Sedangkan sebagian wilayah di Provinsi Kalimantan Barat tergolong dalam daerah tertinggal, meliputi Kabupaten Bengkayang, Landak, Pontianak, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, dan Melawi. Wilayah yang berada pada klasifikasi daerah tertinggal merupakan daerah-daerah yang memiliki sektor basis pertanian, yang mana pertumbuhannya tidak mampu mengangkat pertumbuhan PDRB secara keseluruhan. Selain itu, rendahnya PDRB perkapita pada 6 wilayah tersebut dipengaruhi oleh letak geografis wilayah dimana sebagian besar merupakan daerah perbukitan.



**Gambar 1.** Tipologi Klassen Pulau Kalimantan Menurut PDRB Per Kapita dan Pertumbuhan Ekonomi, 2010-2016

Sumber: BPS, 2010-2016 (diolah)

**B. Ketimpangan Regional**

Berdasarkan hasil analisis ketimpangan dengan menggunakan Indeks Entropi Theil dan Indeks Williamson, diperoleh bahwa secara keseluruhan kondisi ketimpangan

antarkabupaten/kota di Pulau Kalimantan selama periode 2010-2016 cenderung semakin menurun baik di sektor migas maupun non migas.

**Tabel 8.** Nilai Indeks Williamson dan Entropi Theil Antar Kabupaten/Kota, 2010-2016

No.	Tahun	Indeks Williamson		Indeks Entropi Theil	
		Migas	Non Migas	Migas	Non Migas
1	2010	0,7053	0,6411	0,0862	0,1029
2	2011	0,6673	0,6254	0,0739	0,0956
3	2012	0,6764	0,6593	0,0738	0,1004
4	2013	0,6836	0,6438	0,0751	0,0965
5	2014	0,6444	0,6077	0,0690	0,0864
6	2015	0,5955	0,5583	0,0602	0,0727
7	2016	0,5626	0,5350	0,0547	0,0662
	Rata-rata	<b>0,6479</b>	<b>0,6101</b>	<b>0,0704</b>	<b>0,0887</b>

Sumber: BPS, 2010-2016 (diolah)

**Tabel 9.** Indeks Entropi Theil, Entropi Theil Between Group, Entropi Theil Within Group Pulau Kalimantan (Non Migas), 2010-2016

Tahun	Indeks Entropi Theil	Indeks Entropi Theil <i>Between Group</i>	Indeks Entropi Theil <i>Within Group</i> Total	Indeks Entropi Theil <i>Within Group</i>				
				Prov. Kalbar	Prov. Kalsel	Prov. Kalteng	Prov. Kaltim	Prov. Kaltara
2010	0,1029	0,0731	0,0298	0,0038	0,0117	0,0015	0,0111	0,0016
2011	0,0956	0,0652	0,0304	0,0024	0,0112	0,0014	0,0144	0,0012
2012	0,1004	0,0670	0,0334	0,0025	0,0101	0,0012	0,0188	0,0008
2013	0,0965	0,0647	0,0318	0,0027	0,0098	0,0011	0,0175	0,0007
2014	0,0864	0,0591	0,0273	0,0027	0,0092	0,0010	0,0139	0,0006
2015	0,0727	0,0496	0,0231	0,0028	0,0079	0,0019	0,0110	0,0005
2016	0,0662	0,0448	0,0214	0,0029	0,0070	0,0019	0,0101	0,0004
Rata-rata	<b>0,0887</b>	<b>0,0605</b>	<b>0,0281</b>	<b>0,0028</b>	<b>0,0096</b>	<b>0,0011</b>	<b>0,0138</b>	<b>0,0008</b>

Sumber: BPS, 2010-2016 (diolah)

Indeks Entropi Theil dalam penelitian ini tidak hanya dihitung secara total saja, tetapi dihitung Indeks Entropi Theil *Between Group* dan Indeks Entropi Theil *Within Group*. Indeks Entropi Theil *Between Group* digunakan untuk mengetahui gambaran ketimpangan yang terjadi antarprovinsi, sedangkan Indeks Entropi Theil *Within Group* digunakan untuk mengetahui gambaran ketimpangan yang terjadi di dalam provinsi. Kabupaten/kota di Pulau Kalimantan dikelompokkan menjadi lima kelompok dengan dasar pengelompokkan adalah posisi masing-masing kabupaten/kota di lima provinsi. Tabel 8 menunjukkan bahwa Indeks Entropi Theil *Between Group* dan *Within Group* di sektor non migas mempunyai kecenderungan menurun.

Secara keseluruhan, ketimpangan pembangunan di Pulau Kalimantan lebih diakibatkan oleh ketimpangan antarprovinsi dibandingkan ketimpangan dalam provinsi, yang mana ketimpangan antarprovinsi (*between provinces inequality*) menyumbang rata-rata 65,52 persen terhadap ketimpangan total dan sektor migas memberi kontribusi sebesar 62,07 persen terhadap ketimpangan antarprovinsi. Ketimpangan dalam provinsi (*within provinces inequality*) menyumbang sebesar 34,48 persen terhadap ketimpangan total dan sektor non migas memberi kontribusi sebesar 31,75 persen. Wilayah yang berkontribusi besar terhadap ketimpangan antar dan dalam provinsi adalah Provinsi Kalimantan Timur.

**Tabel 10.** Rata-rata Indeks Entropi Theil AntarKabupaten/Kota, 2010-2016

Keterangan	Non Migas	Migas
T-Between Prov	0,0605	0,0437
T-Within Prov	0,0281	0,0267
<b>Total</b>	<b>0,0887</b>	<b>0,1100</b>
T-Between Prov (%)	68,25	62,07
T-Within Prov (%)	31,75	37,93

Sumber: BPS, 2010-2016 (diolah)

**Tabel 11.** Nilai Korelasi Pearson antara PDRB Per Kapita, Indeks Williamson, dan Indeks Entropi Theil

		Nilai Indeks Williamson	PDRB Per Kapita
Nilai Indeks Williamson	Pearson Correlation	1	-0,789(*)
	Sig. (2-tailed)		0,035
	N	7	7
PDRB Per Kapita	Pearson Correlation	-0,789(*)	1
	Sig. (2-tailed)	0,035	
	N	7	7

\* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

		Nilai Entropi Theil	PDRB Per Kapita
Nilai Entropi Theil	Pearson Correlation	1	-0,802(*)
	Sig. (2-tailed)		0,030
	N	7	7
PDRB Per Kapita	Pearson Correlation	-0,802(*)	1
	Sig. (2-tailed)	0,030	
	N	7	7

\* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber: Hasil Pengolahan dengan SPSS

### 1. Pengaruh PDRB per kapita terhadap Ketimpangan Regional

Dalam penelitian ini, akan diuji hubungan antara PDRB per kapita dengan Indeks Williamson dan Indeks Entropi Theil. Untuk menguji hubungan kedua indeks tersebut, digunakan uji korelasi Pearson. Korelasi Pearson merupakan salah satu ukuran korelasi yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linier dari dua variabel. Korelasi hanya menjelaskan kekuatan hubungan tanpa memperhatikan hubungan kausalitas. Koefisien korelasi berada diantara -1 hingga 1. Bila nilai koefisien korelasi 0, artinya tidak ada korelasi atau tidak ada hubungan antarvariabel. Jika nilai koefisien korelasi +1, maka terdapat hubungan positif antarvariabel, sedangkan jika nilai koefisien korelasi -1, maka terdapat hubungan negatif antarvariabel.

Hasil uji korelasi Pearson menunjukkan koefisien masing-masing sebesar -0,789 dan -0,802. Kedua nilai koefisien tersebut mendekati 1 dan bertanda negatif dengan signifikansi pada  $\alpha = 5$  persen. Nilai

koefisien negatif menandakan bahwa tidak ada hubungan antara distribusi pendapatan dengan ketimpangan atau terjadi hubungan yang saling berkebalikan. Ketika distribusi pendapatan meningkat, belum tentu dapat meningkatkan ketimpangan di wilayah Kalimantan.

### 2. Pengujian Hipotesis Kuznets

#### a) Relevansi Hipotesis Kuznets

Hipotesis Kuznets menyatakan bahwa pada pertumbuhan awal suatu daerah, ketimpangannya memburuk, stabil, tetapi pada suatu waktu akan terjadi peningkatan ketimpangan lagi dan akhirnya menurun lagi (Kuncoro, 2002: 152). Pengujian Teori Kuznets (1955) dilakukan dengan menggunakan dua metode. Metode pertama adalah menggunakan estimasi grafik. Estimasi grafik digunakan untuk melihat tren dari bentuk kurva kuadrat yang merupakan hubungan antara Indeks Gini dengan pendapatan per kapita. Selain itu, dilakukan pula metode estimasi kurva untuk membandingkan tipe kuadrat dengan jenis linear dan kubik.

**Tabel 12.** Estimasi Hubungan antara Indeks Gini dengan logaritma PDRB per kapita di Indonesia, 1994-2012

Variabel Penjelas	Linear	Kuadratik	Kubik
C	0,338	-0,825	-0,464
Log PDB	0,477	19,094	10,010
Log PDB kuadratik	-	-18,631	94,772
Log PDB kubik	-	-	-9,569
Sig. (2-tailed)	0,001	0,021	0,025
Adjusted R-squared	0,073	0,780	0,765
R-squared	0,227	0,854	0,843
F-Statistik	1,472	11,658	10,762

Sumber : Hasil perhitungan dengan SPSS

Metode kedua adalah menggunakan estimasi regresi. Estimasi regresi ini menggunakan variabel Indeks Gini sebagai variabel dependen, sedangkan variabel independennya adalah pendapatan per kapita non migas dan pendapatan per kapita non migas kuadrat. Beberapa studi telah menunjukkan bahwa hipotesis Kuznets berlaku dengan membuat estimasi hubungan antara indeks ketimpangan dengan logaritma PDRB per kapita. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Melikhova & Cizek (2012), disusunlah perbandingan tentang penelitian hipotesis Kuznets dari berbagai negara. Kebanyakan penelitian kontemporer mengacu pada metode yang digunakan oleh Ahluwalia (1976), menggunakan regresi linear dengan Indeks Gini sebagai variabel dependen untuk mengukur ketimpangan, sedangkan PDB per kapita negara dalam bentuk logaritma dan logaritma kuadrat menjadi variabel independennya.

*b) Uji Hipotesis Kuznets di Indonesia*

Berlaku atau tidaknya hipotesis Kuznets di Indonesia selama periode 1994-2012 dibuktikan dengan membuat estimasi hubungan antara Indeks Gini dan logaritma PDRB per kapita dalam bentuk persamaan linear, kuadratik, dan kubik. Estimasi dari hubungan antara Indeks Gini dengan logaritma PDRB per kapita dalam bentuk

persamaan linear, kuadratik, dan kubik adalah sebagai berikut (lihat **Tabel 12**).

Berdasarkan hasil estimasi diketahui hubungan antara Indeks Gini dan logaritma PDRB per kapita dengan model persamaan linear menunjukkan  $R^2 = 0,227$ , persamaan kuadratik  $R^2 = 0,854$ , dan persamaan kubik  $R^2 = 0,843$ . Dengan demikian, persamaan kuadratik merupakan model terbaik dalam menjelaskan hubungan antara Indeks Gini dan logaritma PDRB per kapita.

*c) Uji Hipotesis Kuznets di Kalimantan*

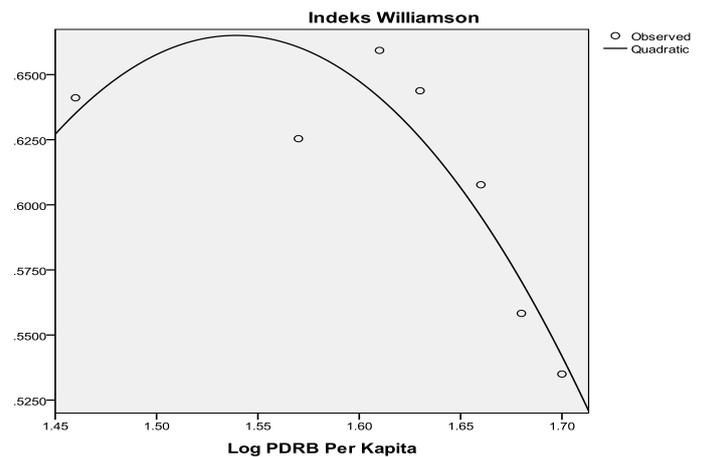
Untuk membuktikan apakah hipotesis Kutnez berlaku di Pulau Kalimantan, dilakukan regresi kuadratik dengan membuat plot grafik antara PDRB per kapita dengan indeks ketimpangan (Indeks Williamson dan Indeks Entropi Theil) pada periode pengamatan. Pembuktian dilakukan menggunakan uji *goodness of fit* atau uji ketepatan model. Dengan melakukan perbandingan antara nilai  $R^2$  dan nilai F antara model yang dianalisis untuk mengetahui plot grafik atau pola yang paling sesuai dengan data. Kriteria yang digunakan adalah grafik nonlinier atau U terbalik dengan nilai  $R^2$  dan nilai F terbesar menjadi model dan grafik yang paling sesuai. Berikut nilai  $R^2$  dan nilai F antara PDRB per kapita dengan Indeks Williamson dan Indeks Entropi Theil.

**Tabel 13.** Nilai R<sup>2</sup> dan F antara PDRB per kapita dengan Indeks Williamson dan Indeks Entropi Theil, 2010-2016

Grafik	R <sup>2</sup>			
	Indeks Williamson	Signifkansi	Indeks Entropi Theil	Signifkansi
Linier	0,623	0,035	0,644	0,030
Nonlinier	0,829	0,029	0,821	0,021
	F			
Linier	8,273	0,035	9,032	0,030
Nonlinier	9,705	0,029	9,159	0,010

Sumber: BPS, 2010-2016 (diolah)

Tabel 13 menunjukkan hubungan antara PDRB per kapita dengan Indeks Williamson, yang mana nilai R<sup>2</sup> pada grafik nonlinier lebih tinggi dari grafik linier, yaitu 0,829 > 0,623 dan nilai uji F nonlinier juga lebih tinggi dari nilai uji F linier, yaitu 9,705 > 8,273. Sedangkan hubungan antara PDRB per kapita dengan Indeks Entropi Teil ditunjukkan pada nilai R<sup>2</sup> pada grafik nonlinier lebih tinggi dari grafik linier, yaitu 0,821 > 0,644. Dan nilai uji F nonlinier lebih tinggi dari nilai uji F linier, yaitu 9,159 > 9,032. Secara keseluruhan nilai signifikansi grafik nonlinier lebih kecil dari grafik linier sehingga sebaran data tidak mengikuti pola linier, tetapi mengikuti pola nonlinier. Dari hasil regresi nonlinier mengindikasikan bahwa hubungan antara PDRB per kapita dengan indeks ketimpangan bersifat nonlinier. Hipotesis Kuznets akan lebih jelas terlihat jika plot data dibuat dalam grafik dengan sebaran nonlinier membentuk huruf U. Hubungan antara PDRB per kapita dan indeks ketimpangan dapat digambarkan dalam Gambar 2 berikut ini:



**Gambar 2.** Kurva Hubungan Antara Indeks Williamson dengan PDRB Per Kapita, 2010-2016 Sumber : Hasil Pengolahan dengan SPSS.

Gambar 2 menunjukkan hubungan antara Indeks Williamson dengan PDRB per kapita yang bersifat nonlinier. Hubungan tersebut ditunjukkan dalam bentuk kurva huruf U terbalik, yang artinya bahwa Hipotesis Kuznets berlaku di Pulau Kalimantan pada periode pengamatan.

Adapun persamaan kuadratik antara Indeks Williamson dengan PDRB per kapita adalah sebagai berikut:

$$IW = -10,627 + 14,672PDRB \text{ per kapita} - 4,766 PDRB^2 \text{ per kapita}$$

Ketimpangan tertinggi (IWmax) di Kalimantan sebesar 0,665 dicapai saat nilai PDRB per kapita mencapai Rp. 34.612.762,05,- atau \$ 2.323,31 (1 \$USD = Rp. 14.898,-).

**Tabel 14.** Ringkasan Hasil Analisis Uji Validitas Hipotesis Kuznets

Periode	Jumlah Negara/Kab/Kota	Kelengkapan Data (%)	GINI/ IW <sub>max</sub> (%)	GDP <sub>TP</sub> /PDRB per kapita (USD)	Referensi
1965-1971	60	0,6	57,6	642	Ahluwalia (1976)
1970-1990	75	0,8	62,7	2.221	Bulir (2001)
1990-2000	44	0,5	45,0	2.575	Hayami (2005)
1965-2003	82	0,8	46,0	2.570	Iradian (2005)
1970-1990	75	0,8	45,9	912	Lin, <i>et.al.</i> , (2006)
1979-2008	145	6,3	43,8	1.528	Melikhova, <i>et.al.</i> , (2010)
2000-2012	55	100	89,0	1.135	Maria Christina (2015)
2010-2016	56	100	66,5	2.323,31	Maria Christina (2018)

Sumber: Christina (2018)

*d) Transformasi Struktural*

Indeks transformasi struktural digunakan untuk melihat pergeseran peran masing-masing sektor terhadap PDRB kabupaten/kota. Untuk melihat hubungan antara perubahan struktural dengan pertumbuhan PDRB perkapita digunakan

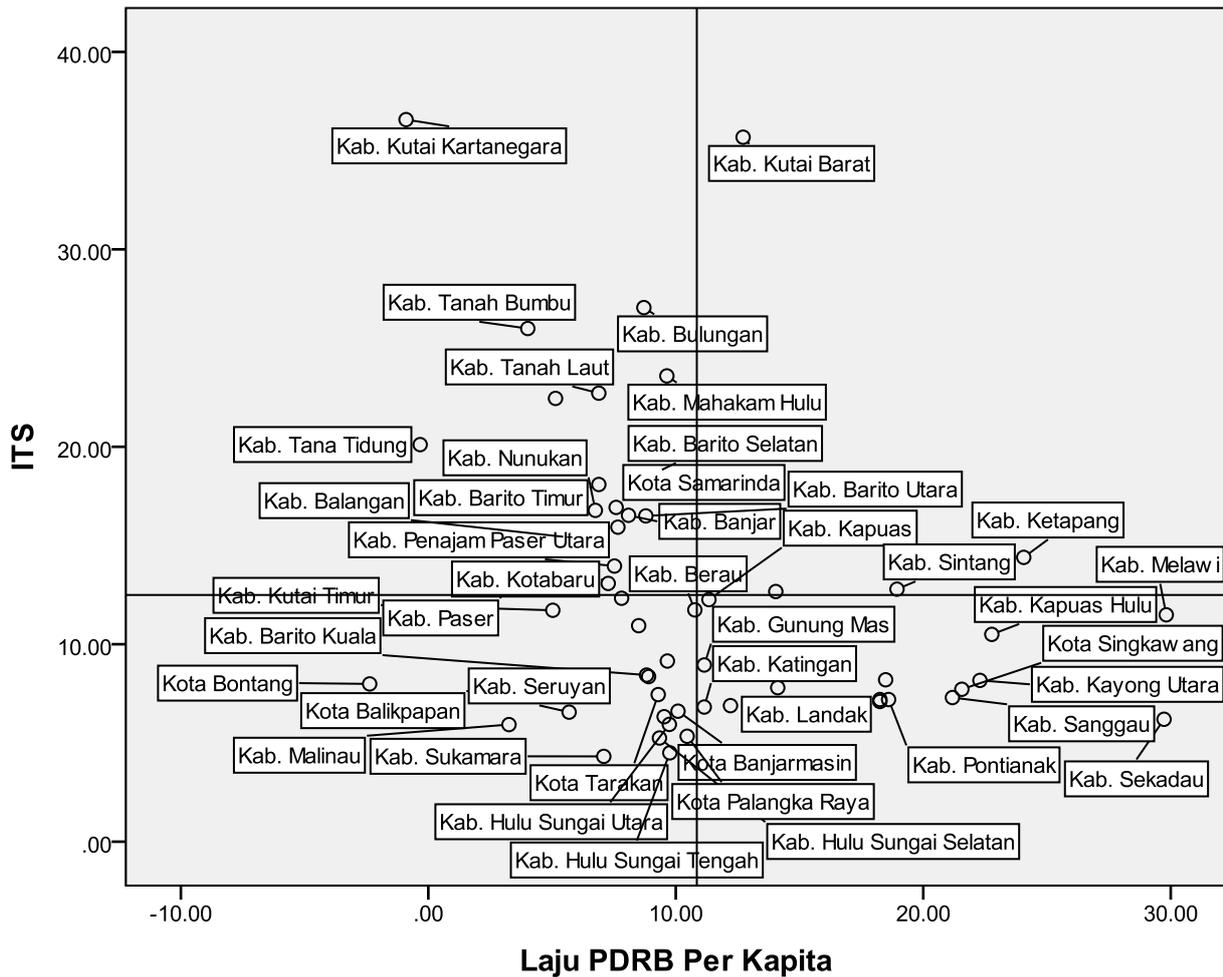
uji korelasi Pearson (Tabel 14). Hasil Pearson *Correlation* menunjukkan angka negatif, yaitu -0,312, artinya tidak terdapat korelasi antara perubahan struktural dengan pertumbuhan PDRB perkapita atau terjadi hubungan yang saling berkebalikan.

**Tabel 15.** Hasil Korelasi Antara Indeks Transformasi Struktural (ITS) dengan Pertumbuhan PDRB Perkapita, 2010-2016

		ITS	Pertumbuhan PDRB Per Kapita
ITS	Pearson Correlation	1	-0,312(*)
	Sig. (2-tailed)		0,019
	N	56	56
Pertumbuhan PDRB Per Kapita	Pearson Correlation	-0,312(*)	1
	Sig. (2-tailed)	0,019	
	N	56	56

\* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber: Hasil Pengolahan dengan SPSS



**Gambar 3.** Klasifikasi Kabupaten/Kota Yang Mengalami Perubahan Struktural, 2010-2016

Sumber: Hasil Pengolahan dengan SPSS

Transformasi struktural terjadi di 22 kabupaten/kota dan mayoritas berada di Provinsi Kalimantan Selatan. Perubahan struktural tercepat terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara (Provinsi Kalimantan Timur), yang mana perekonomiannya beralih dari sektor pertambangan dan penggalian ke sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Struktur perekonomian wilayah ini masih didominasi lapangan usaha berbasis sumberdaya alam, yaitu pertambangan (batubara dan migas).

Struktur ekonomi Kabupaten Kukar selama periode 2012-2016 tidak mengalami pergeseran yang signifikan. Secara khusus lapangan usaha pertambangan dan penggalian sejak Tahun 2013 sharenya cenderung menurun. Disamping karena adanya gejolak harga

komoditas pertambangan (migas dan batubara) di pasar global, juga dipengaruhi oleh produktivitasnya yang cenderung menurun. Pada Tahun 2016 lapangan usaha ini memberi peranan sebesar 64,68 persen, yang pada masa booming di Tahun 2012 memberi peranan sebesar 82,96 persen. Pada Tahun 2015, total produksi batubara di Kabupaten Kutai Kartanegara hanya mencapai 60,77 juta ton atau turun sebesar 23,3 persen.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Simpulan yang dapat ditarik berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Berdasarkan Tipologi Klassen menurut pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita diperoleh bahwa terdapat 6 kabupaten dan 1 kota tergolong dalam daerah maju dan tumbuh. Mayoritas daerah maju dan tumbuh tersebut berada di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang mana diketahui bahwa daerah-daerah di kedua provinsi memiliki PDRB per kapita tinggi.
2. Berdasarkan hasil analisis ketimpangan wilayah dengan menggunakan Indeks Williamson dan Indeks Entropi Theil diperoleh bahwa kondisi ketimpangan pembangunan di Pulau Kalimantan selama periode penelitian menunjukkan kecenderungan semakin menurun. Ketimpangan lebih diakibatkan oleh ketimpangan antarprovinsi (*between provinces inequality*) dibanding ketimpangan dalam provinsi (*within provinces inequality*).
3. Wilayah yang berkontribusi besar terhadap ketimpangan antar dan dalam provinsi adalah Provinsi Kalimantan Timur. Secara keseluruhan, ketimpangan antarkabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan kecenderungan menurun, sementara di Provinsi Kalimantan Timur terlihat cenderung semakin melebar.
4. Ketimpangan yang semakin melebar tersebut diakibatkan oleh adanya disparitas yang tinggi dari tingginya selisih nilai PDRB per kapita tertinggi dan terendah. Selain itu, disparitas juga disebabkan oleh terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi masyarakat dan rendahnya aksesibilitas penghubung pusat-pusat pertumbuhan di wilayah Kalimantan, belum optimalnya pemanfaatan transportasi laut/sungai untuk aksesibilitas daerah tertinggal dan pedalaman, serta terbatasnya kemampuan sumberdaya manusia dalam pemanfaatan potensi sumberdaya unggulan lokal. Secara umum, faktor yang menyebabkan semakin tingginya kondisi ketimpangan suatu daerah adalah ketidakmampuan suatu daerah mengelola otonomi daerah dan desentralisasi fiskal secara optimal, sedangkan faktor yang menyebabkan penurunan ketimpangan adalah semakin meratanya kegiatan pembangunan disemua sektor lapangan usaha.
5. Antara PDRB per kapita dengan Indeks Williamson dan Indeks Entropi Theil tidak terdapat hubungan atau hanya terjadi hubungan yang saling berkebalikan. Kekuatan hubungan tersebut tidak selalu menimbulkan hubungan sebab. Tinggi rendahnya PDRB per kapita wilayah Kalimantan tidak berpengaruh terhadap besar kecilnya ketimpangan pendapatan antarkabupaten/kota di wilayah Kalimantan, begitu juga sebaliknya.
6. Hasil uji *goodness of fit* menunjukkan bahwa hubungan antara PDRB per kapita dengan indeks ketimpangan, bersifat non linier (kuadratik). Artinya, Hipotesis Kutnez berlaku di Pulau Kalimantan.
7. Transformasi struktural tidak terjadi di seluruh kabupaten/kota di Pulau Kalimantan. Dengan melihat peran masing-masing sektor terhadap total PDRB kabupaten/kota, transformasi struktural terjadi di 22 kabupaten/kota yang tersebar di lima provinsi. Transformasi struktural ini terjadi karena tidak semua kabupaten/kota di Pulau Kalimantan memiliki potensi sumberdaya alam yang melimpah. Perubahan struktural tercepat terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara (Provinsi Kalimantan Timur). Perkembangan ekonomi di kabupaten tersebut menunjukkan transformasi dari sektor

pertambangan dan penggalian ke sektor pertanian.

### B. *Saran*

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, saran yang dapat disampaikan sebagai berikut.

1. Prioritas pembangunan yang dapat dilakukan untuk mengurangi ketimpangan adalah dengan meningkatkan aksesibilitas antardaerah khususnya di bagian barat Pulau Kalimantan yang relatif tertinggal dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Salah satunya adalah peningkatan penyediaan infrastruktur transportasi, penyediaan moda transportasi perintis pada daerah-daerah yang tidak bisa dijangkau transportasi umum, dan pengembangan kerjasama antardaerah dalam pengembangan transportasi. **Tindaklanjut dari saran ini terkait dengan instansi-instansi: Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.**
2. Mayoritas daerah maju tumbuh di Kalimantan berada di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dengan sektor pertambangan dan penggalian sebagai sektor unggulan. Kedepan, program pembangunan di wilayah-wilayah tersebut harus lebih diarahkan pada program-program yang mendorong kinerja sektor pertanian dan tidak mengandalkan sektor pertambangan penggalian, mengingat nilai produksi sektor migas di Pulau Kalimantan dari tahun ke tahun cenderung menurun. Penataan dasar yang dapat dilakukan pemerintah daerah adalah meningkatkan peran sektor pertanian secara luas melalui pengembangan komoditas yang memiliki peluang ekspor, promosi investasi dan perdagangan, pengembangan kawasan ekonomi terpadu ataupun kawasan ekonomi yang didasarkan pada keterkaitan antarsektor ekonomi dan kawasan sentra produksi. **Tindaklanjut dari saran ini terkait**

**dengan instansi-instansi: Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.**

3. Pembangunan pertanian di Pulau Kalimantan ke depan tidak lagi dilakukan secara tradisional, akan tetapi harus lebih diarahkan kepada upaya-upaya untuk peningkatan produktivitas, mutu, nilai tambah produk (*value added*), dan daya saing produk (*cometitiveness*). Selanjutnya secara proposional peran migas, pertambangan, dan kehutanan sebagai penopang utama perekonomian dikurangi secara bertahap melalui pengembangan secara intensif sektor-sektor lainnya sehingga perekonomian wilayah Kalimantan dapat terjamin keberlanjutannya. **Tindaklanjut dari saran ini terkait dengan instansi-instansi: Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.**

### DAFTAR PUSTAKA

- Akita, T. 2003. Decomposing Regional Income Inequality in China and Indonesia Using Two-Stage Nested Theil Decomposition Method (versi elektronik). *Annals of Regional Science*. March 2003, Vol. 37 Issue 1, p55. 23p.
- Ayelazuno, J.A. 2013. Neoliberalism and Growth Without Development in Ghana: A Case for State-Ied Industrialization. *Journal of Asian and African Studies* 2014 49:80, 3 May 2013.
- Bappenas. 2010. Kajian Strategis Aktivitas Ruang Antara Kawasan Strategis Nasional Dengan Daerah Tertinggal di Pulau Kalimantan. Tersedia di <http://www.kawasan.bappenas.go.id/>, images, diakses pada 02 Desember 2014.

- Bonet, J. Ann, R.S. 2006. Fiscal Decentralization And Regional Income Disparities: Evidence From The Colombian Experience. *The Annals of Regional Science* Volume 40, Issue 3: 661-676, August 2006.
- BPS. 2016. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha 2010-2016. BPS. Jakarta.
- BPS. 2016. Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Provinsi-Provinsi di Indonesia 2010-2016. BPS. Jakarta.
- Cingano, F. 2014. Trends In Income Inequality And Its Impact On Economic Growth. *OECD Social, Employment and Migration Working Papers* No. 163.
- Christina, M. 2015. Analisis Pusat Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan di Kalimantan. Tesis tidak diterbitkan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Chrisyanto, C. 2006. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Perekonomian Antardaerah di Indonesia”. Program Studi Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Tersedia di <http://www.lib.ui.ac.id/file?file=digital/20308322-T%2031693>, diakses pada 16 Juli 2014.
- Dhyatmika, K.W. 2013. Analisis Ketimpangan Pembangunan Provinsi Banten Pasca Pemekaran. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang. Tersedia di <http://eprints.undip.ac.id/38984/1/DHYATMIKA.pdf> diakses pada 25 Agustus 2014.
- Easterly, W. 2001. *The Political Economy of Growth Without Development: A Case Study of Pakistan*. Development Research Group, World Bank, June 2001.
- Kuncoro, M. 2002. Analisis Spasial dan Regional: Studi Aglomerasi dan Kluster Industri Indonesia. UPP-AMP YKPN. Yogyakarta.
- Kuncoro, M. 2004. Otonomi Dan Pembangunan Daerah: Reformasi Perencanaan, Strategi, dan Peluang. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Kuncoro, M. Idris, A.N. 2010. Mengapa Terjadi Growth Without Development Di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Volume 11, No. 2, Desember 2010, halaman 172-190.
- Kuncoro, M. 2013. Can MP3EI Reduce Inter-Regional Inequality?. *South East Asian Journal of Contemporary Business, Economics, and Law*.
- Kuncoro, M. Christina, M. 2016. *Membangun Kalimantan: Potensi Ekonomi Daerah, Pusat Pertumbuhan, Dan Strategi*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Ncube, *et al.*, 2014. Inequality, Economic Growth and Poverty in the Middle East and North Africa (MENA). *African Development Review*, Vol. 26, No. 3, 2014, 435–453.
- Ogunleye, E.K. 2011. *Structural Transformation In Sub-Saharan Africa: The Regional Growth Poles Strategy*. African Economic Conference, Kigali.
- Rochana, S. H. 2012. Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah Pada Era Otonomi Daerah Di Indonesia. Tersedia di <http://sappk.itb.ac.id/spe/wpcontent/uploads/2013/11/otonomi daerah->

- sayembara.pdf, diakses pada 15 September 2014.
- Santosa, S.H. 2015. Disparitas Pertumbuhan Ekonomi Dan Pembangunan Ekonomi Wilayah Di Satuan Wilayah Pembangunan IV Provinsi Jawa Timur. *Media Trend* Vol. 10 No.2 Oktober 2015, hal. 116-128.
- Sitorus, D.Y.R. 2012. Analisis Pertumbuhan dan Ketimpangan AntarKabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2001-2009. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang. Tersedia di <http://www.eprints.undip.ac.id/35998/1/SITORUS.pdf>, diakses pada 13 Agustus 2014.
- Soetopo, R.W.S. 2009. Analisis Ketimpangan Pendapatan Antarpulau di Indonesia. Tersedia di <http://www.repository.ip.ac.id/handle/123456789/14371.html>, diakses pada 10 Juli 2014.
- Yang, Y. Angang, H. 2008. Investigating Regional Disparities of China's Human Development with Cluster Analysis. A Historical Perspective. *Social Indicators Research*, Vol. 86 No. 3 (pp. 417-432). Springer
- Todaro, M. Smith, S. C. 2003. *Economic Development*, Eight Edition. Pearson Education Limited, United Kingdom.
- Todaro, M. Smith, S.C. 2006. *Economic Development*, Edisi Kesembilan, Jilid 1. (Drs. Haris Munandar, M.A.; Puji A.L., S.E, Trans). Jakarta: Penerbit Erlangga. (Pearson Education Limited, United Kingdom diterbitkan tahun 2006).
- Williamson, J.G. 1965. *Regional Inequality and The Process of Nation Development: A Description of The Pattern* (versi elektronik). *Journal of Economic Development and Cultural Change*, Vol 13. No.4, Part 2 (Juli, 1965). pp.1-84.

*Halaman Kosong*